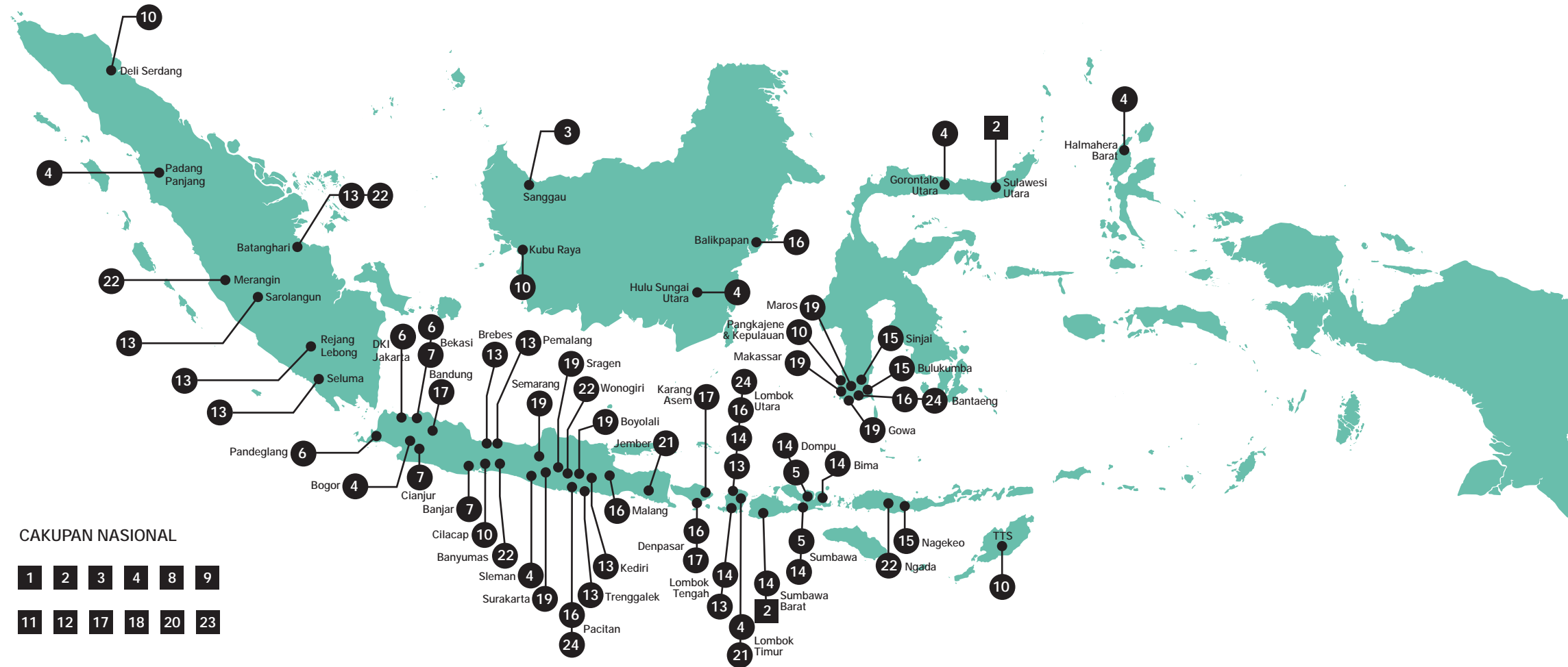


\* Direvisi pada  
19 Januari 2018



# LAPORAN TAHUNAN 2016

Menuju Kebijakan Promasyarakat Miskin melalui Penelitian



CAKUPAN NASIONAL

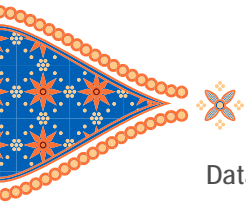
- 1
- 2
- 3
- 4
- 8
- 9
- 11
- 12
- 17
- 18
- 20
- 23

- 1** Studi tentang Kerja Pengasuhan dan Perawatan Tak Berbayar di Indonesia
- 2** Tinjauan Capaian MDGs dan Kesiapan Menuju SDGs
- 3** Reformulasi Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 4** Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal di Indonesia: Penilaian Awal tentang Tantangan dan Peluang bagi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- 5** Pemantauan dan Evaluasi Dampak Program EINRIP: Studi Sosial Kualitatif Setelah Perbaikan Jalan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat-2015
- 6** Studi Opini Para Tokoh tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak Usia Dini
- 7** Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi pada Masa Gejolak Harga Pangan-Fase 3
- 8** Kemiskinan Multidimensi pada Anak: Perkembangan Terkini dan Analisis Mendalam
- 9** Kemiskinan dan Disparitas pada Anak Perkotaan: Suara Lirih Anak Indonesia yang Hidup dalam Kemiskinan
- 10** Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM
- 11** Penguatan Program Jaring Pengaman Berbasis Pangan: Perbandingan Pelaksanaan, Evolusi, dan Pembelajaran antar negara (Kasus Indonesia)
- 12** Kajian Penggunaan Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010
- 13** Pemantauan Proses Pelaksanaan PKKPM-P2B 2015–2016
- 14** Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 15** Pemantauan dan Evaluasi Dampak Program EINRIP: Studi Sosial Kualitatif Setelah Perbaikan Jalan di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur-2016
- 16** Kajian Awal Pelaksanaan Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung Kube-PKH)
- 17** Penguatan Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN: Implikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 18** Studi Ketenagakerjaan *Employment Transformation*
- 19** Studi Kebijakan Pengurangan Ketimpangan di Indonesia
- 20** Pemutakhiran Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia
- 21** Studi Diagnostik mengenai Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan, Khususnya di Perkebunan Tembakau
- 22** Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- 23** Studi Penyusunan Strategi Kelulusan dari Program Keluarga Harapan (PKH)
- 24** Studi Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)





Menuju Kebijakan Promasyarakat Miskin melalui Penelitian



Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

The SMERU Research Institute.

Laporan Tahunan 2016

/ ditulis oleh The SMERU Research Institute.

40 p. ; 27 cm.

Termasuk indeks.

ISBN 978-602-7901-43-8

ISSN 977-259-7881-00-3

1. Penelitian. I. Judul

001.4--ddc22

 The SMERU Research Institute

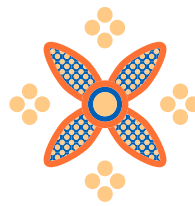
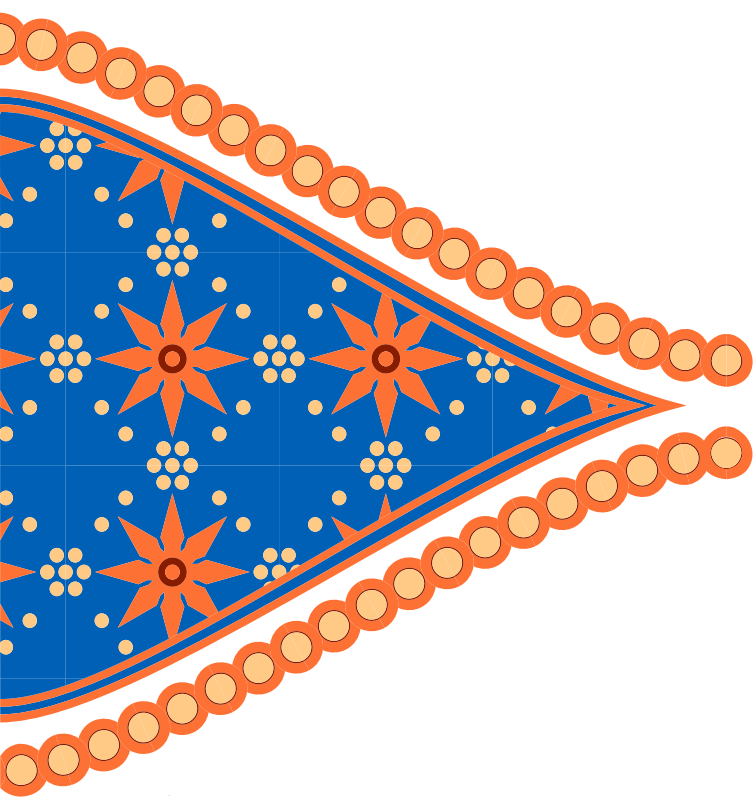
 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute







## TENTANG KAMI

The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai aspek sosial-ekonomi yang sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer di Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di Indonesia.

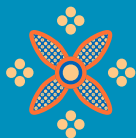
### Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis bukti

### Misi

- Melakukan penelitian mengenai berbagai isu terkait kemiskinan guna memperbaiki kebijakan publik dan swasta, serta pelaksanaannya
- Melakukan penjangkauan efektif kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas internasional, dan sektor swasta
- Mendukung wacana kebijakan publik dan swasta yang inklusif mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan
- Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan swasta

## SAMBUTAN PEMBINA



Gema Satria/SMERU

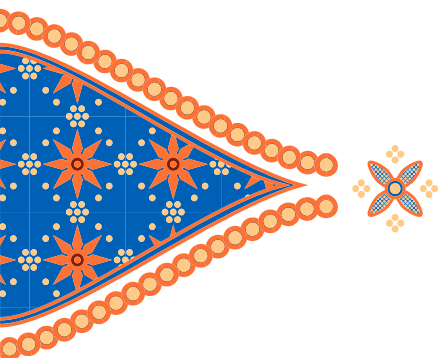
**M**eskipun konsep desentralisasi dan otonomi daerah sebagai basis pengembangan demokrasi di Indonesia sudah muncul pada masa awal kemerdekaan melalui Undang-Undang (UU) No. 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah dan UU No. 22/1948 tentang Pemerintah Daerah, dalam praktiknya pemerintah kala itu masih menerapkan politik sentralisasi. Setelah berlangsung lebih dari setengah abad, barulah rakyat bisa mengoreksi hal tersebut dengan disepakatinya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dilaksanakan secara konsekuen dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan terus disempurnakan—terakhir diperbarui melalui UU No. 23/2014. Pada awalnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini menghadapi banyak tantangan, tetapi kini telah muncul berbagai inovasi daerah dan makin bertambah jumlah pejabat daerah yang berkembang menjadi pejabat nasional.

Setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan otonomi daerah dengan titik berat di tingkat kabupaten/kota, masyarakat politik Indonesia mulai percaya diri untuk memberi ruang bagi demokrasi di tataran akar rumput dengan mengesahkan UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Sesungguhnya masyarakat desa telah lama mengenal otonomi desa. Akan tetapi, mereka cenderung hanya memilih sosok karena konsep mengenai organisasi yang berfungsi menata suara dan kegiatan rakyat belum berkembang. Kondisi seperti itu masih tecermin dalam kehidupan kemasyarakatan kita sekarang dan menghambat pembangunan demokrasi yang egaliter.

Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni sekitar tahun 2000, SMERU melakukan studi-studi mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan hasilnya telah digunakan untuk memberikan masukan bagi berbagai kebijakan. Selanjutnya, SMERU terus mengarusutamakan isu desentralisasi dan otonomi daerah dalam berbagai kajiannya, khususnya terkait isu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Mulai akhir 2015, SMERU melakukan studi kualitatif untuk memantau pelaksanaan UU Desa—kajian difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Studi ini tentunya sangat penting dan SMERU berkewajiban mewacanakan hasil kajiannya, terutama tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengorganisasikan kemandirian mereka.

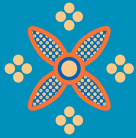
Dalam penelitian sosial-ekonomi di Indonesia, SMERU menempati posisi spesial di kalangan pejabat publik dan akademisi, terutama di tingkat nasional. Pada tahun-tahun mendatang, SMERU perlu meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Langkah-langkah SMERU ke arah ini, seperti (i) mengadakan Forum Berbagi Hasil Penelitian di Kota Surakarta yang dihadiri pihak-pihak terkait, dan (ii) berbagi pengetahuan tentang metode penelitian dengan beberapa lembaga penelitian (di perguruan tinggi), perlu dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

Tanpa kerja keras peneliti dan dukungan pengorganisasian yang kuat oleh manajemen, semua kegiatan SMERU tersebut akan sulit tercapai. Di samping itu, dukungan pendanaan dari lembaga donor, khususnya dana hibah dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia, melalui Program Knowledge Sector Initiative (KSI), telah memberikan dukungan signifikan bagi SMERU. Program ini juga telah memberi kesempatan bagi SMERU untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya serta bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan lembaga-lembaga mitra kerja KSI lainnya. Untuk semua itu, atas nama Pembina Yayasan SMERU, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. ❖



**Dr. Syaikhu Usman**  
Ketua

## SAMBUTAN MANAJEMEN



Gema Satria/SMERU

Komitmen untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata merupakan agenda besar pembangunan di seluruh dunia. Komitmen ini terangkum dalam Sustainable Development Goal (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan dan 169 target turunan; dengan target utama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Agenda baru SDGs ini dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif. Dengan tujuan dan target yang lebih banyak, tentunya tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian SDGs akan lebih berat.

Menanggapi tantangan ini, Bappenas selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia meminta SMERU melakukan kajian pencapaian MDGs dan kesiapan menuju SDGs di Indonesia. Studi ini memberikan pembelajaran dan masukan, khususnya bagi Pemerintah Pusat, dalam hal perencanaan, penganggaran, dan koordinasi pelaksanaan SDGs.

Selain itu, SMERU terlibat dalam proses perumusan berbagai kebijakan dengan Bappenas melalui, antara lain, diskusi-diskusi perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Pada kesempatan lain, hasil temuan studi *baseline* (awal) UU Desa dijadikan bagian dari modul pelatihan untuk pendamping desa yang disusun oleh Bappenas.

Saat ini, isu ketimpangan antardaerah di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pengurangan ketimpangan yang tinggi makin penting untuk dilakukan agar target pengentasan kaum miskin yang tertuang dalam RPJMN dan SDGs dapat tercapai. Pada akhir 2016, SMERU menyiapkan *concept note* (catatan konsep) terkait isu ketimpangan di



Indonesia untuk memenuhi permintaan staf khusus Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini menunjukkan komitmen SMERU untuk proaktif memberi masukan mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

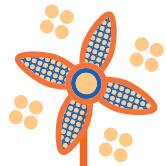
SMERU terus berupaya untuk terlibat dalam dialog dan komunikasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan di tingkat subnasional. Terkait hal ini, pada Maret 2016, SMERU, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, mengadakan “Lokakarya Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Acara ini bertujuan membangun dialog kebijakan yang konstruktif serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi SMERU untuk berdiskusi dan memperkenalkan kegiatan penelitian dan publikasi SMERU, khususnya studi-studi SMERU yang pernah dilakukan di Kota Surakarta dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan keberlanjutan finansial, SMERU mulai mengembangkan rencana bisnis yang difokuskan pada pengembangan kapasitas internal organisasi dan memperluas kerja sama dengan pihak eksternal. Rencana bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SMERU dalam mengelola sumber-sumber pendanaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian dengan memperbesar proporsi dana yang bersumber dari dana hibah kompetitif.

Menutup tahun 2016, SMERU melakukan studi banding ke beberapa lembaga penelitian di Yogyakarta, yaitu SurveyMETER, PSKK UGM, PKMK FK UGM, IRE, IDEA, dan HRC. Kegiatan ini bertujuan mendalami konsep dan praktik-praktik terkait pengembangan organisasi secara berkelanjutan di lembaga-lembaga tersebut. Pembelajaran dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman manajemen dan staf SMERU dalam mengambil berbagai keputusan strategis untuk mendorong kemandirian Lembaga.

Laporan ini memotret ruang lingkup kerja kami sepanjang 2016 yang tidak mungkin dapat kami capai tanpa dedikasi, komitmen, dan profesionalitas seluruh staf SMERU. Kami sangat bangga atas apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan yang akan datang. ❖

**Dr. Asep Suryahadi**  
Direktur



# MOMEN PENTING SMERU 2016



JAN

**"Lokakarya Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin"** yang diselenggarakan oleh The SMERU Research Institute dan Pemerintah Kota Surakarta: Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) mempresentasikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018



**INTERNAL SEMINAR di SMERU:**  
Emmanuel Skoufias (Bank Dunia) mempresentasikan hasil penelitiannya yang menjelaskan tentang **"Synergies in Child Nutrition: Interactions among Health & Environment, Care Practices, and Food"**



MAR

**"Seminar Nasional Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin: Berbagi Hasil Penelitian Program Studi Ekonomi Pembangunan UNS dan The SMERU Research Institute"**: Peneliti SMERU dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret (UNS) memaparkan hasil-hasil penelitian di bidang sosial-ekonomi



**PEMAPARAN:**  
Sudarno Sumarto dan Hastuti mempresentasikan draf laporan penelitian **"Enhancing Food-Based Safety Net Programs: Cross-Country Implementation, Evolution, and Learning (An Indonesian Case Study)"** di kantor Bank Dunia, Washington D.C., Amerika Serikat



**PEMAPARAN, 8-11 Maret:**  
Meuthia Rosfadhila mempresentasikan hasil studi **"Developing an Unemployment Insurance Scheme for Indonesia"** pada acara Workshop of International Social Protection Training yang diselenggarakan oleh GIZ di Cebu City, Filipina



APR

**KERTAS KERJA:**  
**"Inequality and Stability in Democratic and Decentralized Indonesia"** memberikan dukungan empiris tentang dampak ketimpangan terhadap meningkatnya kekerasan di kabupaten yang berada di provinsi yang sebelumnya dianggap daerah rawan konflik



**PEMAPARAN, 27-30 April:**  
Rika Kumala Dewi mempresentasikan hasil studi **"Opinion Leader Research on Barriers to Optimal Infant and Young Child Feeding Practices in Indonesia"** pada acara **"Advocacy for Infant and Young Child Feeding: Strategy Updates in Selected Countries in the ASEAN Region and Beyond"** di Bangkok, Thailand



MEI

**PEMAPARAN, 19-20 Mei:**  
Rendy Adriyan Diningrat mempresentasikan artikel **"The Birth of the Village Law: Where are the Marginalized Groups?"** pada acara lokakarya **"The New Law, New Villages? Changing Rural Indonesia"** yang diselenggarakan oleh KITLV di Universitas Leiden, Belanda



**LOKAKARYA:**  
**"Indonesian Development Research Network (IDRN)"** yang diselenggarakan ANU Indonesia Project, bekerja sama dengan The SMERU Research Institute: 40 peneliti yang terdiri atas penerima dana hibah penelitian 2015/16 dan pemenang seminar ilmiah (*call for papers*) 2016 dari Indonesia dan Australia mempresentasikan hasil penelitiannya



Widjajanti Isdijoso mempresentasikan pengalaman SMERU dalam mengaplikasikan *gender equality and social inclusion* (GESI) dalam penelitian ekonomi dan kemiskinan pada acara **"Knowledge Sharing on Gender and Social Inclusion Perspective in Research for Development"** yang diselenggarakan oleh KSI



DES

Abstrak penelitian berjudul **"Protecting Poor Pregnant Mothers and Newborns in the Era of Universal Health Care Scheme: Case of Indonesia"** terpilih menjadi salah satu poster yang ditampilkan pada acara **"The Fourth Global Symposium on Health Systems Research"** di Vancouver, Kanada. Poster ini menyoroti keterbatasan finansial sebagai salah satu hambatan utama masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu, anak, dan bayi baru lahir



NOV

**LAPORAN PENELITIAN:**  
**"Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM"** mengungkapkan bahwa guncangan akibat perubahan kebijakan subsidi BBM serta guncangan dari berbagai sumber lain—termasuk kekeringan—yang mengganggu mata pencaharian di sektor pekerjaan yang didominasi laki-laki cenderung meningkatkan partisipasi kerja perempuan



**JURNAL:**  
Artikel **"The Consequences of Child Market Work on the Growth of Human Capital"** diterbitkan pada jurnal *World Development* Vol. 91. Studi ini mengukur pengaruh pasar pekerja anak terhadap pertumbuhan modal manusia jangka panjang, dengan fokus utama pada keterampilan matematika, keterampilan kognitif, fungsi organ paru, dan capaian pendidikan



OKT

Mohammad Zulfan Tadjoeeddin dan Asep Suryahadi menjadi narasumber dalam diskusi mengenai kondisi produktivitas sektor industri manufaktur Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Bappenas



Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) dengan SMERU sebagai tuan rumah: 3 peneliti SMERU dan 2 peneliti dari luar SMERU memaparkan hasil penelitiannya



AGU

Asep Suryahadi menyampaikan presentasi tentang **"Indikator Kemiskinan untuk Wilayah Jakarta"** dalam Rakerda TKPK Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh BPMPKB DKI Jakarta



**CATATAN KEBIJAKAN:**  
**"Membenahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Memperkuat Desa"** membahas kondisi dan tantangan yang dihadapi BPD di sepuluh desa dalam "Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat"



**JURNAL:**  
Artikel **"Sub-National Health Care Financing Reforms in Indonesia"** diterbitkan dalam jurnal *Health Policy and Planning* 32 (1). Studi ini menginvestigasi dampak skema pembiayaan pelayanan kesehatan di daerah terhadap pelayanan kesehatan dan proteksi finansial



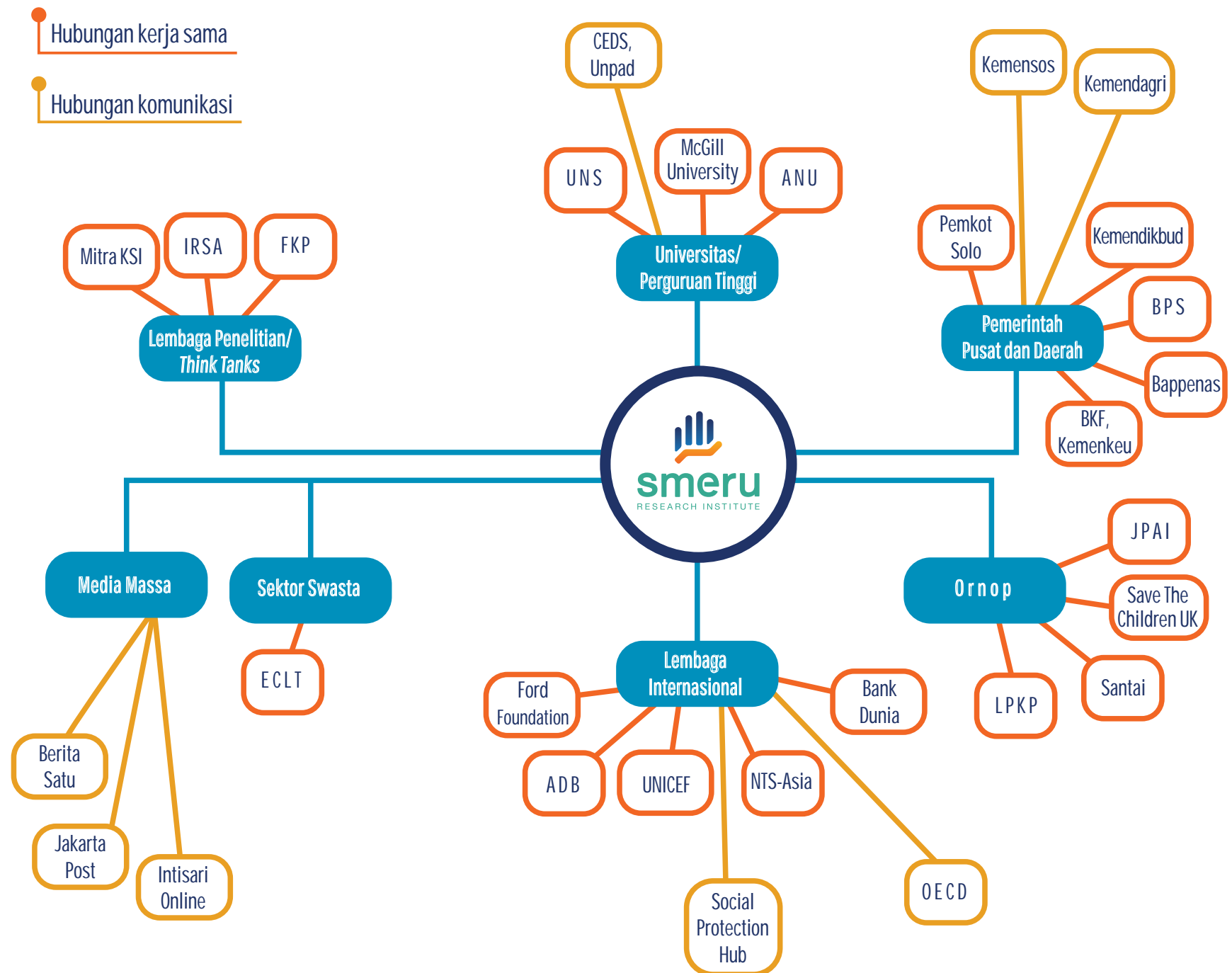


# JEJARING SMERU 2016

Sepanjang 2016, SMERU terus memperkuat kegiatan jejaring dengan berbagai pihak. Meskipun dari segi jumlah tidak banyak meningkat, intensitas dan kualitas komunikasi kami tingkatkan sehingga dapat berjalan dua arah.

Pemerintah terus menjadi pemangku kepentingan utama kami karena misi utama SMERU adalah meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian SMERU bagi perbaikan kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Meskipun demikian, SMERU terus membangun relasi dengan lembaga internasional, lembaga penelitian, universitas, organisasi nonpemerintah, dan dunia usaha sebagai mitra strategis. Kami juga mulai membangun relasi dengan media massa sebagai mitra dalam melakukan amplifikasi isu-isu kebijakan yang menjadi kajian SMERU.

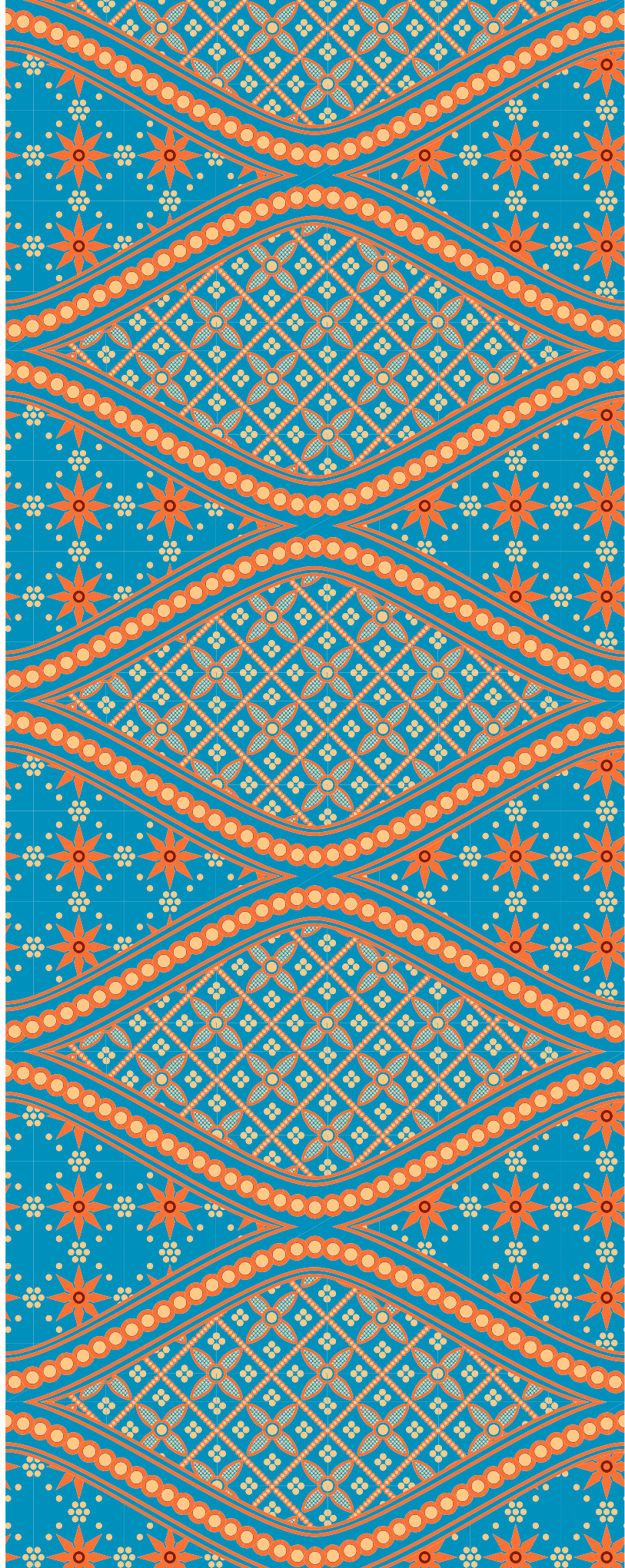




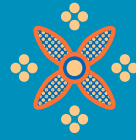
## MOTIF BATIK KHAS SOLO

Motif pada batik tradisional klasik selalu memiliki filosofi tersendiri. Pada motif batik, khususnya di Jawa Tengah, terutama Solo dan Yogyakarta, setiap gambar memiliki makna.

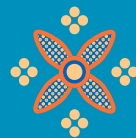
Hal ini berhubungan dengan arti atau makna filosofis dalam kebudayaan Hindu-Jawa. Pada motif tertentu, ada yang dianggap sakral dan hanya dapat dipakai pada kesempatan atau peristiwa tertentu.







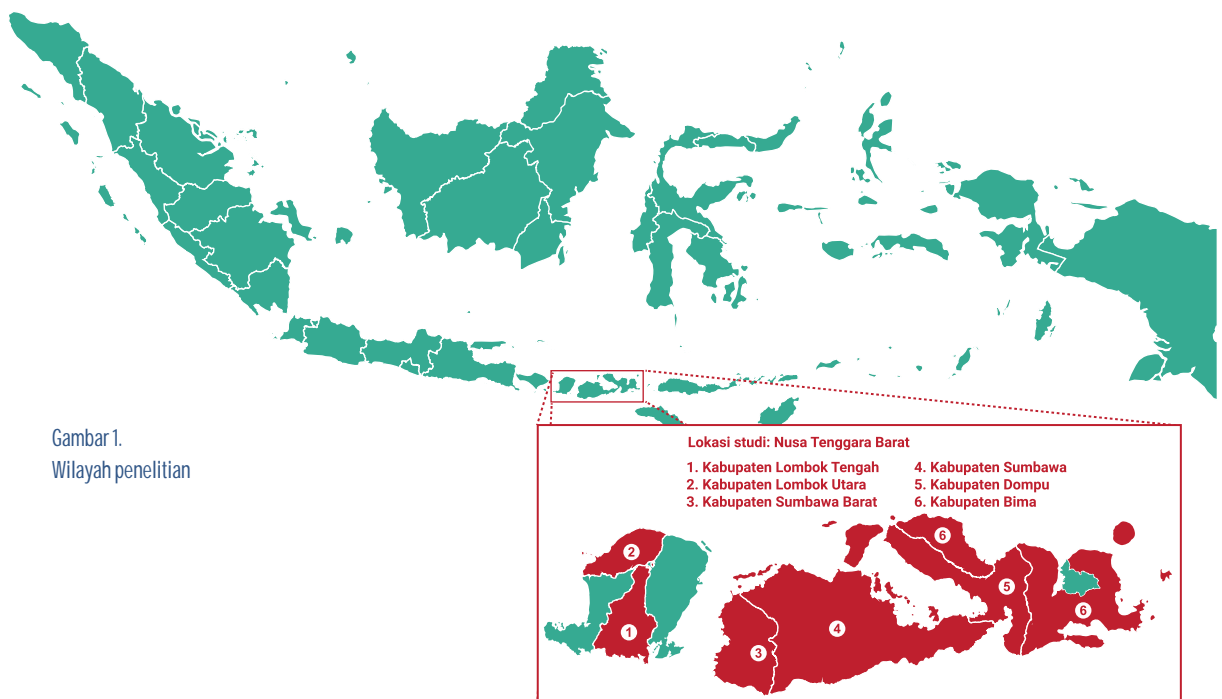
1	PETA CAKUPAN WILAYAH PENELITIAN SMERU 2016
3	TENTANG SMERU
4	SAMBUTAN
8	MOMEN PENTING SMERU 2016
10	JEJARING SMERU 2016
14	KEGIATAN UTAMA KAMI Sorotan Penelitian Penjangkauan
30	ORGANISASI KAMI
36	LAPORAN KEUANGAN



## STUDI DIAGNOSTIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**D**alam rangka membantu persiapan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), pada Juli–Agustus 2016, The SMERU Research Institute melaksanakan studi kualitatif di enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gambar 1). Studi ini ditujukan untuk memahami konteks sosial-politik-ekonomi, perkembangan inovasi pembelajaran, dan pemetaan pemangku kepentingan, dengan fokus pada pembelajaran di tingkat pendidikan dasar.

Studi ini menemukan sepuluh permasalahan utama dalam pembelajaran di tingkat pendidikan dasar (Gambar 2). Empat di antaranya berkaitan dengan manajemen guru, yaitu rendahnya kualitas guru, kurang dan tidak meratanya jumlah guru, kurangnya pelatihan guru, dan rendahnya komitmen guru. Sementara itu, enam permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan anggaran dan infrastruktur pendidikan, rendahnya dukungan orang tua, rendahnya minat belajar anak, kuatnya pengaruh politik, ketidaktuntasan belajar murid, dan lemahnya pengawasan. Berbagai permasalahan dalam pembelajaran di tingkat pendidikan dasar tersebut pada akhirnya menyebabkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi murid. Untuk itu, perlu diupayakan jalan keluarnya melalui, antara lain, (i) penyelesaian persoalan kualitas dan manajemen guru guna menghasilkan guru berkualitas dan profesional dalam jumlah memadai dan (ii) perbaikan sistem belajar-mengajar yang mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi.



Gambar 1.  
Wilayah penelitian



Di sisi lain, di semua kabupaten studi ditemukan inovasi-inovasi pembelajaran. Jumlah dan bentuk inovasinya bervariasi antarkabupaten. Dampak berbagai inovasi tersebut belum dapat dievaluasi karena kecilnya jumlah dana, sedikitnya jumlah penerima, dan pendeknya periode pelaksanaan program. Namun, terdapat indikasi bahwa kabupaten yang memiliki jumlah inovasi lebih banyak cenderung memiliki kinerja pendidikan dasar—dilihat dari angka putus sekolah, nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG), nilai rata-rata ujian nasional, angka partisipasi sekolah, dan rasio murid-guru—yang lebih baik.



Mukti Mulyana/SMERU

Gambar 2. Permasalahan utama pembelajaran murid SD dan SMP di Indonesia

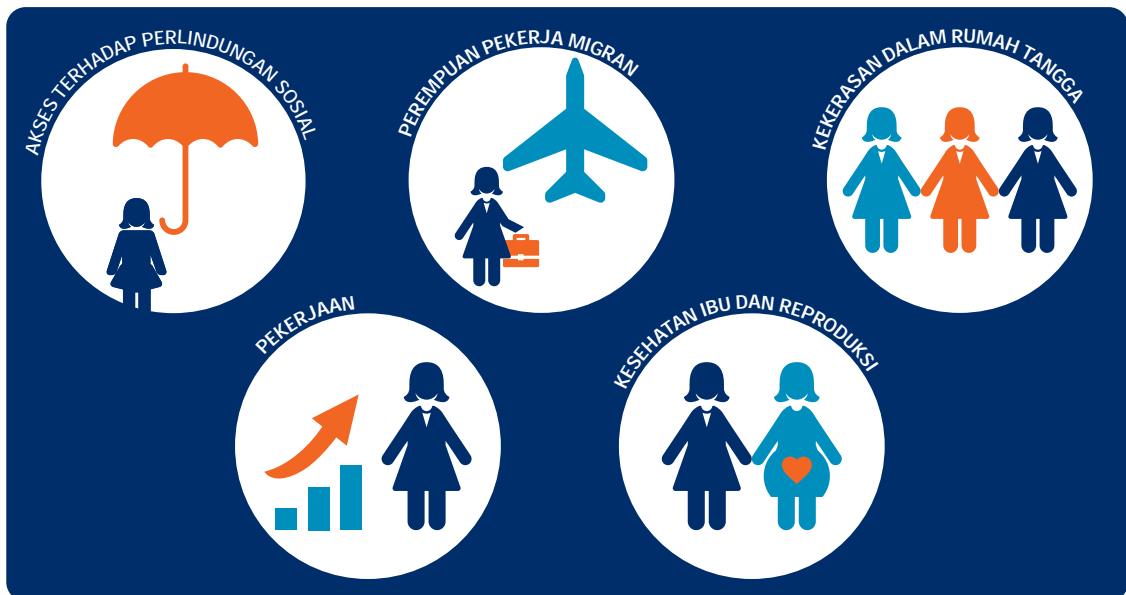
Studi ini juga memetakan peranan aktor-aktor utama dalam pembelajaran yang meliputi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dinas Pendidikan. Meskipun secara umum sekolah dan Dinas Pendidikan dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh paling tinggi, di empat dari enam kabupaten studi ini justru bupati yang dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh lebih tinggi. Di tiga kabupaten studi, DPRD juga dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh yang tinggi, meskipun posisinya masih di bawah sekolah. Tingginya tingkat ketertarikan bupati dan DPRD tersebut sangat menentukan besarnya dukungan anggaran bagi pendidikan dasar dan beragamnya jenis inovasi yang ditujukan bagi guru dan murid. ❖



Dok. SIMERU

## DINAMIKA PENGHIDUPAN PEREMPUAN MISKIN: STUDI KASUS KETIKA TERJADI PERUBAHAN HARGA BBM

Studi yang dilakukan pada lima kabupaten<sup>1</sup> ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal sepanjang 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan penetapan subsidi tetap (*fixed subsidy*) BBM tahun 2015 terhadap penghidupan perempuan miskin pada lima tema penghidupan (Gambar 1). Di samping itu, studi ini juga mempelajari dampak penerimaan tiga program perlindungan sosial<sup>2</sup> yang tercakup dalam Program Perlindungan Sosial (PPS) 2014 terhadap penghidupan perempuan miskin pada lima tema tersebut.



Gambar 1.  
Lima tema penghidupan perempuan miskin





Terdapat tiga temuan utama dalam studi ini. Pertama, meskipun perubahan kebijakan subsidi tetap BBM merupakan sumber guncangan berskala nasional yang dialami seluruh wilayah studi, intensitas dampaknya berbeda-beda antarwilayah studi karena adanya sumber guncangan lokal lainnya. Sumber guncangan lain tersebut adalah kekeringan dan turunnya harga komoditas pertanian yang merupakan sumber penghasilan utama kelompok miskin di beberapa wilayah studi.

Gambar 2.

Temuan studi: pengurangan subsidi BBM dan berbagai guncangan ekonomi lain mendorong perempuan melakukan lebih banyak pekerjaan tambahan, selain tetap mengurus keluarga



Kedua, pada wilayah studi di mana guncangan menerpa sektor pekerjaan yang didominasi laki-laki, perempuan cenderung menambah jumlah pekerjaan yang dilakukan guna mempertahankan pendapatan keluarga (Gambar 2).

Ketiga, studi ini menemukan bahwa PPS 2014 sangat kecil pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (i) nilai nominal bantuan tunai serta nilai manfaat asuransi kesehatan yang tidak memadai, dan (ii) waktu pemberian bantuan yang tidak tepat.

Seiring bertambahnya beban perempuan dalam keluarga miskin saat mata pencaharian utama laki-laki mengalami gangguan, diperlukan upaya bersama pada tingkat keluarga terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Pemerintah juga dapat mulai merancang program perlindungan sosial yang ditargetkan khusus bagi perempuan miskin, misalnya pemberian beasiswa bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya penggantian peran pengasuhan anak saat kedua orang tuanya bekerja. Selain itu, saat terjadi guncangan, program bantuan tunai tidak bersyarat seperti PSKS memberikan ruang lebih luas bagi rumah tangga sasaran dalam mengalokasikan tambahan dana tersebut untuk pos-pos pengeluaran utama. Program semacam ini bersifat lebih responsif dan adaptif terhadap segala kemungkinan guncangan yang menimpa kehidupan masyarakat miskin, bahkan guncangan berskala rumah tangga sekalipun yang sulit terdeteksi oleh Pemerintah Pusat. ❖

<sup>1</sup> Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan.

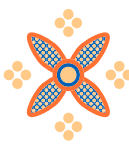
<sup>2</sup> Tiga program perlindungan sosial tersebut adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

## PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

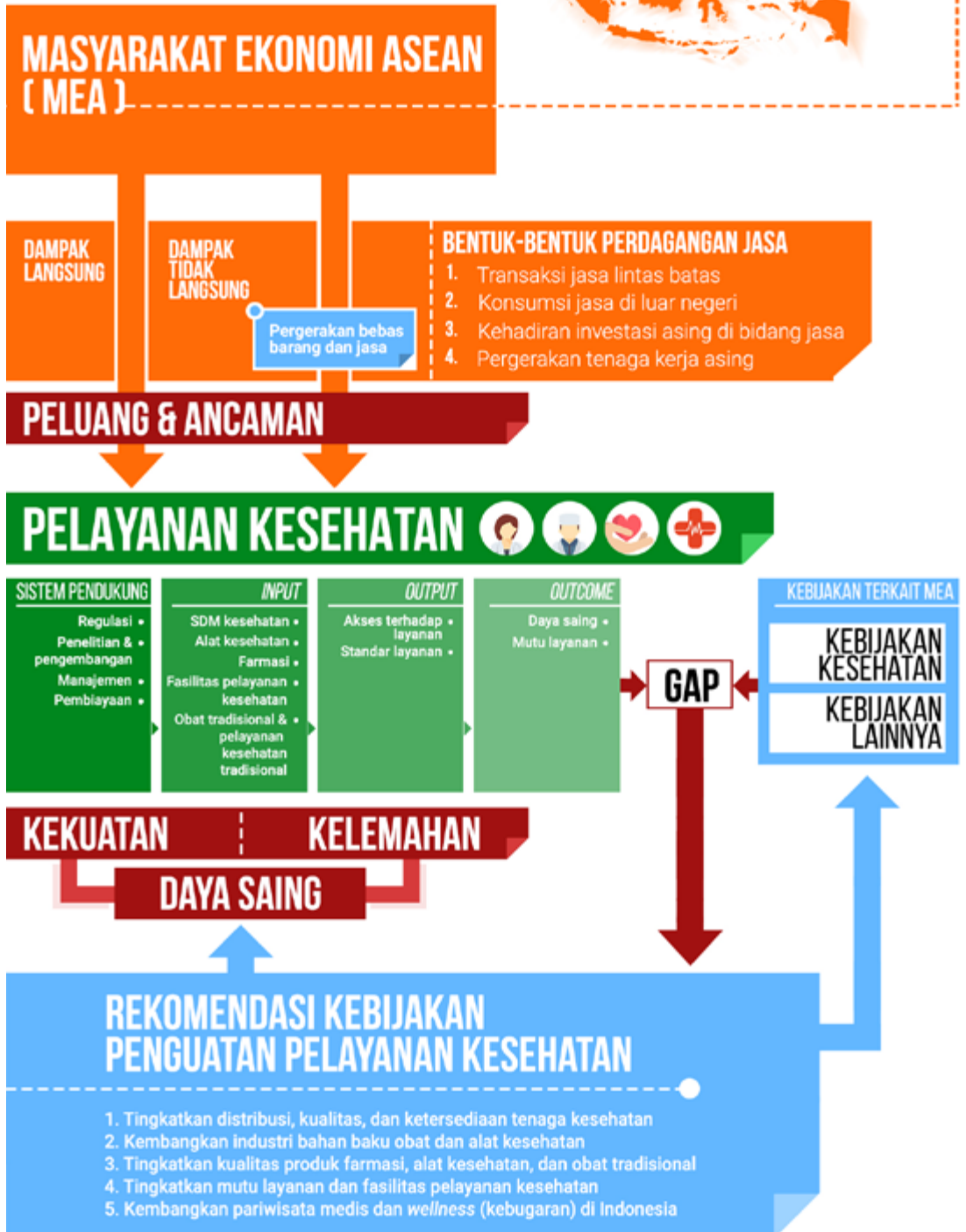
Kerja sama perdagangan multilateral antarnegara ASEAN dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi dimulai pada 31 Desember 2015. Skema kerja sama regional ini dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi ekonomi kawasan ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal. Pelaksanaan MEA mendatangkan peluang sekaligus ancaman bagi sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai akibat adanya harmonisasi peraturan serta peningkatan aliran barang, jasa, dan investasi yang lebih terbuka. Dalam rangka mempersiapkan kebijakan untuk penguatan pelayanan kesehatan di Indonesia pada era MEA, The SMERU Research Institute bersama Bappenas melakukan kajian “Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN: Implikasi MEA”. Kajian ini dilaksanakan dari Mei 2016 hingga Februari 2017 dan bertujuan mengidentifikasi implikasi MEA pada lima elemen pelayanan kesehatan serta menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi MEA.

Kajian ini menemukan bahwa keberadaan MEA dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pada berbagai elemen pelayanan kesehatan di Indonesia (lihat infografis) dengan cara meningkatkan distribusi, kualitas, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam bentuk pengembangan industri bahan baku obat dan alat kesehatan; peningkatan kualitas produk farmasi, alat kesehatan, dan obat tradisional; peningkatan mutu layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan mendorong pengembangan pariwisata medis dan *wellness* (kebugaran) di Indonesia.

Agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang keterbukaan pasar pada era MEA, pemerintah perlu memperbaiki sistem insentif tenaga kesehatan agar tidak terjadi *brain drain* (hengkangnya tenaga ahli ke luar negeri). Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap tenaga kesehatan asing; fasyankes; serta produk obat, alat kesehatan, dan obat tradisional yang beredar di dalam negeri guna menjamin tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk mengembangkan pariwisata medis dan *wellness*, pemerintah perlu membentuk *health tourism board* (badan pariwisata kesehatan), mempromosikan kualitas fasyankes di Indonesia baik ke dalam maupun ke luar negeri, dan menyinergikan langkah tersebut dengan penyediaan layanan kesehatan tradisional. ❖



# KERANGKA KONSEPTUAL DAMPAK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN





M. Fajar Rakhmadi/SMERU

## DARI MDGs KE SDGs: PELAJARAN, TANTANGAN, DAN ANTISIPASI KEBIJAKAN

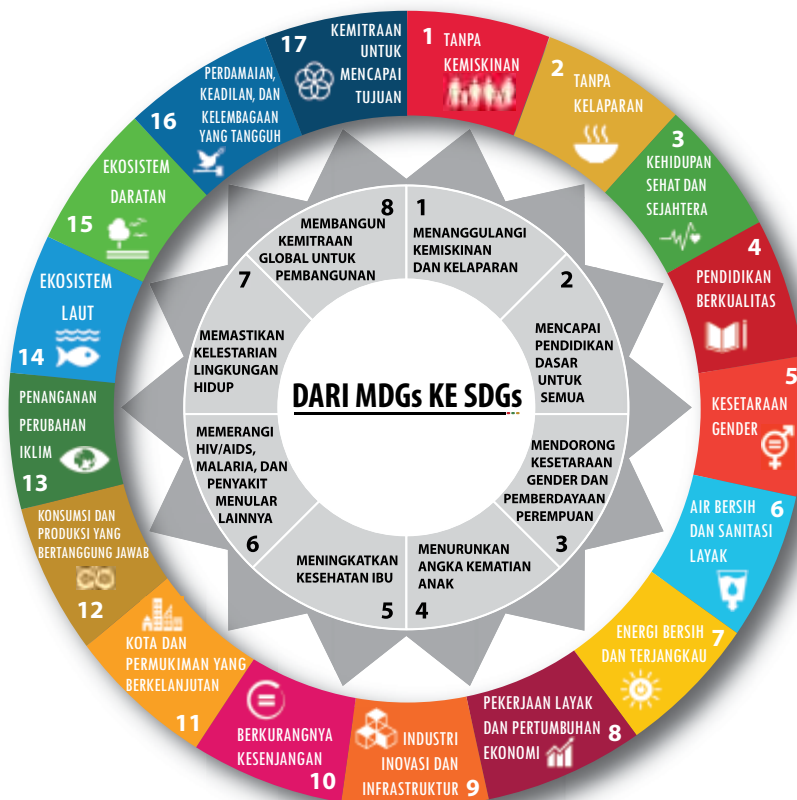
Agenda pembangunan global yang terangkum dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) berakhir pada 2015 dan Indonesia berkomitmen mengadopsi agenda pembangunan baru yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk 15 tahun ke depan. Agenda SDGs dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif melalui pencapaian 17 tujuan dan 169 target. Agar bisa mencapai target dengan lebih baik, Indonesia perlu berpijak pada kondisi pembangunan saat ini serta capaian MDGs.

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya mencapai target SDGs, pada akhir 2015 hingga awal 2016 SMERU bersama Bappenas melakukan kajian berbasis studi literatur, analisis data sekunder, serta rangkaian diskusi pakar di tingkat nasional dan di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Kajian ini menyoroti capaian target MDGs serta mandat baru SDGs dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin akan dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai SDGs, khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan.

Pelajaran utama dari pelaksanaan MDGs yang relevan untuk SDGs adalah perlunya segera dilakukan sinkronisasi agenda pembangunan global tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, peranan dan rasa kepemilikan pemerintah daerah (pemda) perlu terus ditingkatkan karena merekalah yang menjadi ujung tombak kesuksesan pelaksanaan agenda pembangunan global ini.

Di samping itu, pemantauan dan evaluasi MDGs yang lalu juga terkendala oleh ketersediaan data yang kredibel. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan data indikator SDGs, setidaknya hingga tingkat kabupaten/kota.

Kendala lain yang perlu diatasi adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemda, serta antarlembaga lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah, keterbatasan fiskal, dan minimnya sosialisasi serta partisipasi publik. Pembagian tugas dalam pencapaian serta pemantauan SDGs antara Pemerintah Pusat dan pemda sangat strategis untuk segera dilakukan. Dengan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas sejak awal pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dapat dilakukan di tingkat lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari donor seperti yang terjadi pada pelaksanaan MDGs. ❖



## PELAJARAN & TANTANGAN



Sinkronisasi agenda global ke dalam dokumen perencanaan



Meningkatkan peranan dan rasa kepemilikan pemerintah daerah



Ketersediaan data yang kredibel untuk pemantauan dan evaluasi



Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah



Mengatasi kendala fiskal untuk pembiayaan SDGs di daerah



Meningkatkan sosialisasi SDGs dan partisipasi publik

# TAHUN AWAL PELAKSANAAN UU DESA: DI MANA PERANAN KAUM MARGINAL?

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)–yang mulai dilaksanakan pada 2015–melahirkan harapan akan terlaksananya demokratisasi di tingkat lokal, termasuk penerapan tata kelola yang baik (*good governance*). Berkenaan dengan hal tersebut, SMERU, bekerja sama dengan PNPM Support Facility (PSF) Bank Dunia, melakukan studi pemantauan implementasi UU Desa dengan fokus pada isu tata kelola pemerintahan desa. Studi ini bertujuan memahami: (i) praktik tata kelola yang mencakup prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas; (ii) daya tanggap pemerintah desa terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya, terutama kelompok marginal; dan (iii) eksistensi serta kontribusi institusi lokal (seperti Badan Permusyawaratan Desa, disingkat BPD, dan/atau lembaga adat) dan aktivis desa (seperti aktor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, atau PNPM) dalam implementasi UU Desa. Studi longitudinal (November 2015 hingga April 2018) ini dilaksanakan di sepuluh desa yang berlokasi di lima kabupaten, dengan menempatkan seorang peneliti lokal untuk tinggal (*live in*) di masing-masing kabupaten dan mencatat kegiatan formal dan informal yang diselenggarakan berbagai pihak–masyarakat, lembaga/pihak pemerintah (terutama desa, lalu kecamatan dan kabupaten), maupun kalangan nonpemerintah–dalam proses pelaksanaan UU Desa.



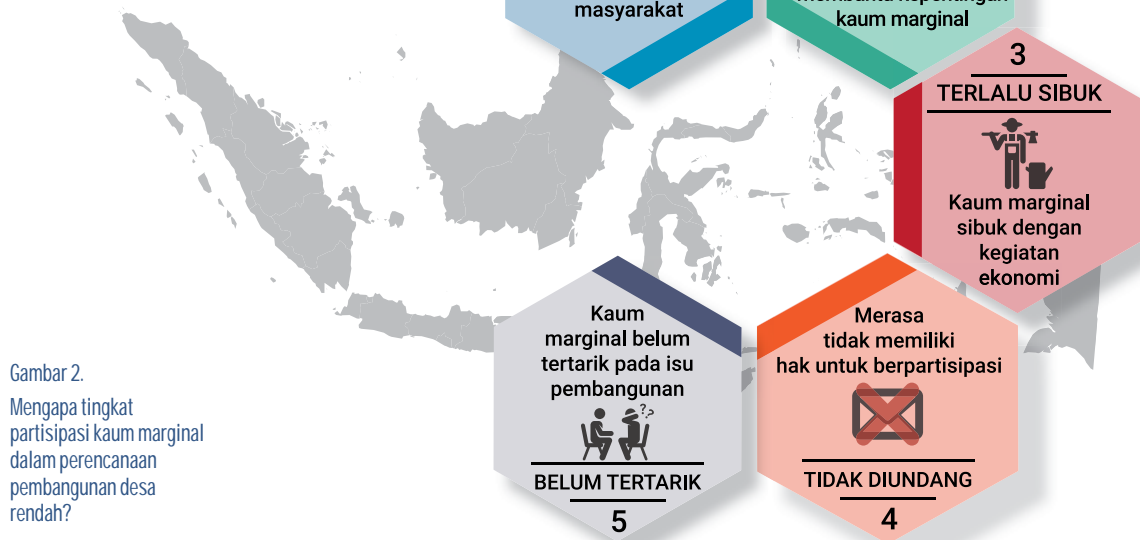
Gambar 1.  
Wilayah penelitian





Hasil studi *baseline* (awal) dan pemantauan sepanjang November 2015 hingga April 2016 memperlihatkan bahwa keterlibatan kaum marginal—sering dirujuk sebagai kelompok perempuan dan orang miskin yang umumnya tereksklusi—dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas. Belum terlihat adanya perubahan signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelum berlakunya UU Desa. Setidaknya ada dua penyebab kondisi ini, yaitu: (i) desain proses perencanaan pembangunan desa yang terbatas dan masih didominasi elite desa, dan (ii) rendahnya motivasi warga untuk berpartisipasi, di satu sisi, serta kesibukan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain.

## PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI KAUM MARGINAL



Gambar 2.  
Mengapa tingkat partisipasi kaum marginal dalam perencanaan pembangunan desa rendah?

Untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal, dibutuhkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan inklusif hingga tingkat desa. Proses tersebut dapat didukung melalui peraturan terkait alokasi anggaran desa yang secara eksplisit mengafirmasi kebutuhan kelompok miskin dan perempuan (*pro-poor and pro-women policies*). Peran BPD, kelompok masyarakat, kader/pendamping, dan aktor lain di tingkat lokal sebagai saluran aspirasi bagi kelompok marginal juga perlu dioptimalkan. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan, antara lain, mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif, misalnya *blusukan* ke rumah tangga miskin dan wilayah dusun terpencil. ❖



## PUBLIKASI SMERU 2016

Sepanjang 2016, SMERU telah memublikasikan sembilan laporan, dua kertas kerja, dan dua catatan kebijakan, dan menyebarkannya kepada berbagai pemangku kepentingan SMERU.



### LAPORAN PENELITIAN

**Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011**

Hastuti, Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Robert Justin Sodo, Asri Yusrina, Rahmitha, Gracia Hadiwidjaja, dan Prio Sambodho

Oktober 2016



### KERTAS KERJA

**Inequality and Stability in Democratic and Decentralized Indonesia**

Mohammad Zulfan Tadjoeeddin (Western Sydney University, Australia), Athia Yumna (The SMERU Research Institute), Sarah E. Gultom (Monash University, Malaysia), M. Fajar Rakhmadi (The SMERU Research Institute), M. Firman Hidayat (Bappenas), dan Asep Suryahadi (The SMERU Research Institute)

April 2016



### CATATAN KEBIJAKAN

■ **Seri UU Desa No. 2/2016: Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa**

Palmira Permata Bachtiar

Agustus 2016

■ **No. 1/2016: Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia untuk Mendukung Program SDGs dan Perencanaan Pembangunan**

Irdam Ahmad

April 2016



### PUBLIKASI LAINNYA

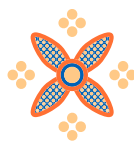
**Laporan Tahunan 2015**

November 2016



**Newsletter No. 37/2016 – Community Coping Strategies for Facing Food Price Volatility/Strategi Bertahan Masyarakat dalam Menghadapi Gejolak Harga Pangan**

Desember 2016



PUBLIKASI YANG HANYA DIUNGGAH KE SITUS WEB SMERU

## LAPORAN PENELITIAN

1. **Multidimensional Poverty of Farmers: Results of Participatory Assessment in Gampong Cahya, Kabupaten Aceh Timur**  
Sirojuddin Arif dan Herry Widjanarko  
September 2016 (final)
2. **Monitoring and Evaluation of Development Programs in Five Ministries: A Study on the System and Implementation**  
Akhmadi, Hastuti, Armand Arief Sim, Athia Yumna, Gracia Hadiwidjaja, Nina Toyamah, Radi Negara, Rahmitha, Sri Budiayati, Syaikhu Usman, dan Yudi Fajar M. Wahyu  
Juni 2016 (final)
3. **Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah**  
Akhmadi, Asri Yusrina, dan Athia Yumna  
Juni 2016 (final)
4. **The Dynamics of Poor Women's Livelihood: A Case Study amidst a Fuel Price Change**  
Niken Kusumawardhani, Dyan Widyaningsih, Valentina Y. D. Utari, Joseph Natanael Marshan, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan Michelle Andrina  
Desember 2016 (draf)
5. **A Socioeconomic Analysis of National Road Improvements in Indonesia: A Case Study of the EINRIP 2015 Road Improvement in Dompu and Sumbawa**  
Yudi Fajar M. Wahyu, Bambang Sulaksono, dan Widjajanti Isdijoso  
November 2016 (draf)
6. **Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM**  
Niken Kusumawardhani, Dyan Widyaningsih, Valentina Y.D. Utari, Joseph Natanael Marshan, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan Michelle Andrina  
September 2016 (draf)
7. **Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum**  
Rahmitha, Hastuti, Dyan Widyaningsih, Niken Kusumawardhani, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi  
Juni 2016 (draf)
8. **Poor Women's Livelihoods and Access to Public Services**  
Rahmitha, Hastuti, Dyan Widyaningsih, Niken Kusumawardhani, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi  
Mei 2016 (draf)

## KERTAS KERJA

1. **Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota**  
Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi  
September 2016 (final)
2. **Determining Comprehensive Criteria and Census Variables for the Protection of the Poor at the Local Level**  
Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi  
September 2016 (final)

## RANGKUMAN EKSEKUTIF

1. **Opinion Leader Research on Barriers to Optimal Infant and Young Child Feeding Practices in Indonesia**  
Rika Kumala Dewi, Ulfah Alifia, Nurmala Selly Saputri, Vita Febriany, dan Intani Nur Kusuma  
Agustus 2016 (final)

## TULISAN SMERU DALAM PUBLIKASI ORGANISASI LAIN

1. **Reflection: Making Children's Voices Count**  
Rendy Adriyan Diningrat  
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016
2. **Meet the Expert: Quality Life for Indonesia Children**  
Rachma Indah Nurhani  
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016
3. **Young Researcher Profile: Rendy Adriyan Diningrat**  
Rendy Adriyan Diningrat  
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016
4. **Reflections: Barriers to Optimal Breastfeeding and Complementary Feeding Practices in Indonesia**  
Rika Kumala Dewi  
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016
5. **Young Researcher Profile: Rika Kumala Dewi**  
Rika Kumala Dewi  
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016
6. **Meet the Expert: Athia Yumna**  
Athia Yumna  
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016
7. **Protecting Poor Pregnant Mothers and Newborns in the Era of Universal Health Care Scheme: Case of Indonesia**  
Athia Yumna, Sri Budiayati, Asep Kurniawan, Nurmala Selly Saputri, Yudi Fajar M. Wahyu, dan Kartawijaya  
Poster elektronik yang diterbitkan the Health Systems Global pada the Fourth Global Symposium, Vancouver, Kanada, 14-18 November 2016
8. **Universal Health Care Scheme Consequences on Local Health Financing: Indonesia's Experience**  
Asep Kurniawan, Athia Yumna, Sri Budiayati, Nurmala Selly Saputri, Yudi Fajar M. Wahyu, dan Kartawijaya  
Poster elektronik yang diterbitkan the Health Systems Global pada the Fourth Global Symposium, Vancouver, Kanada, 14-18 November 2016
9. **Sub-national Health Care Financing Reforms in Indonesia**  
Robert Sparrow, Sri Budiayati, Athia Yumna, Nila Warda, Asep Suryahadi, dan Arjun S. Bedi  
Artikel jurnal yang diterbitkan dalam Health Policy and Planning

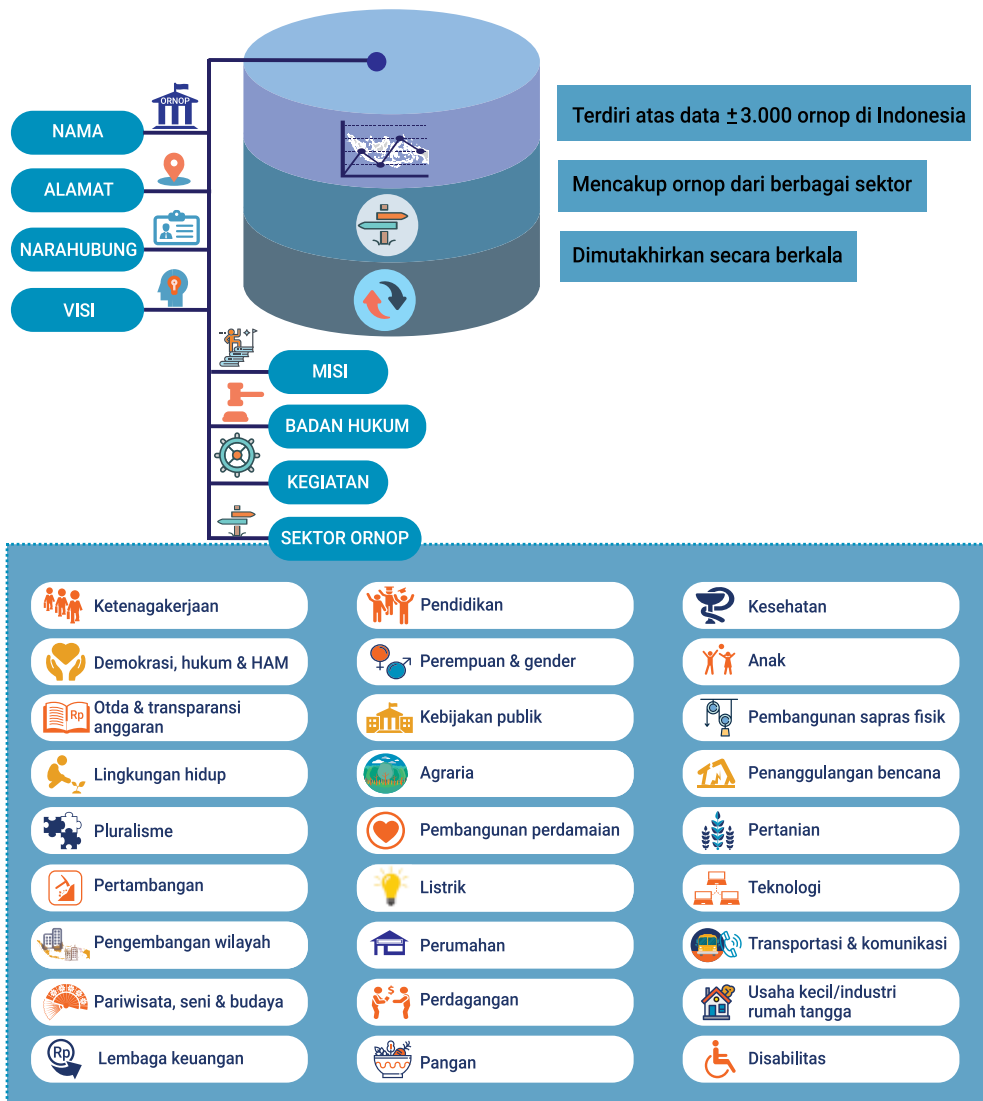
# DATA & INFORMASI

SMERU membuka akses bagi publik terhadap pangkalan data ornop dan peta kemiskinannya secara *online* (dalam jaringan). Berikut ini gambaran singkat mengenai kedua produk tersebut.

## PANGKALAN DATA ORNOP

Pangkalan Data Ornop SMERU merupakan sumber data ornop *online* yang paling lengkap di Indonesia. Pangkalan data ini dapat memfasilitasi individu/lembaga dalam mengontak ornop-ornop di Indonesia. Selain itu, pangkalan data ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang sedang melakukan penelitian tentang ornop di Indonesia.

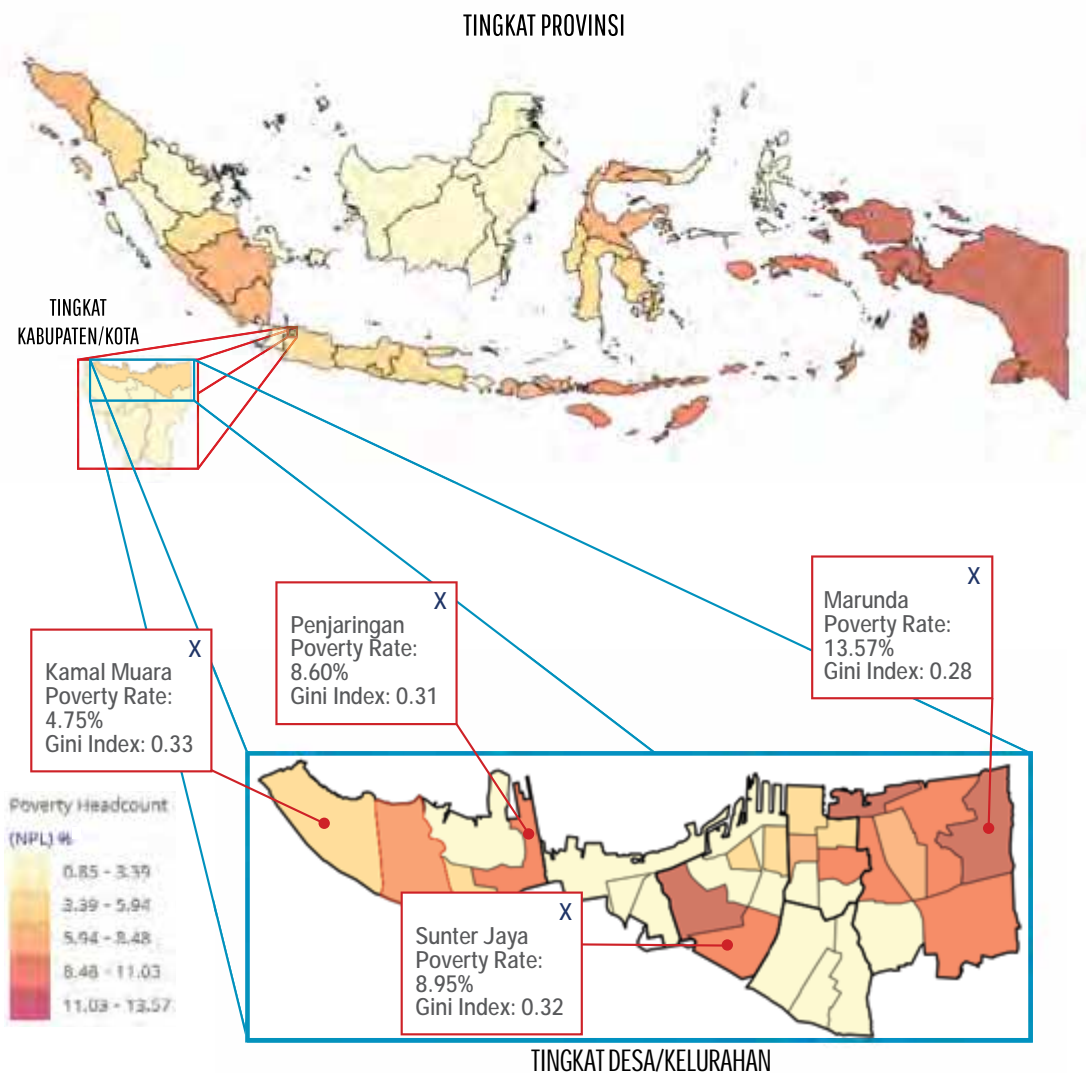
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pangkalan Data Ornop SMERU, hubungi Hariyanti Sadaly di [hari@smeru.or.id](mailto:hari@smeru.or.id).



## PETA KEMISKINAN DAN PENGHIDUPAN INDONESIA 2015

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 merupakan peta kemiskinan yang mutakhir. Penyusunan peta ini menggunakan data Sensus Penduduk 2010, Susenas 2010 dan 2015, serta Podes 2014. Peta ini menyediakan statistik kemiskinan hingga tingkat desa serta mengombinasikan angka kemiskinan dengan informasi sosial-ekonomi guna meningkatkan mutu analisis kemiskinan. Oleh karena itu, peta ini merupakan sumber data yang kaya untuk penelitian dan penetapan sasaran kebijakan dan program.

Untuk menggunakan peta ini, kunjungi [povertymap.smeru.or.id](http://povertymap.smeru.or.id).





# • SMERU DI INTERNET •

## SEPANJANG 2016



WWW

**-FACEBOOK-**

**FANPAGE LIKES**  
MENINGKAT

**77%**

JUMLAH  
**FANPAGE LIKES**



KOMPOSISI  
**FANPAGE FOLLOWERS**



45%



55%

**-TWITTER-**

**FOLLOWERS**  
MENINGKAT

**32%**

JUMLAH  
**FOLLOWERS**



JUMLAH  
**PROFILE VISITS**

**9.905** KALI

**-YOUTUBE-**

**SUBSCRIBERS**  
MENINGKAT



**TOTAL VIEWS**  
MENINGKAT  
DARI

2.945 VIEWS

MENJADI  
**8.449** VIEWS

**WATCH TIME**  
MENINGKAT  
DARI

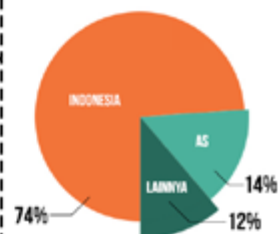
13.493 MENT

MENJADI  
**41.800** MENT

**-SITUS WEB-**

**WEB VISITS**  
SEBANYAK  
**1.395.879** KALI

KOMPOSISI  
**WEB VISITS**



**4 LAPORAN**  
TERBANYAK  
DIUNDUH

**1.565** KALI | PERAN KECAMATAN  
DALAM PELAKSANAAN  
UU DESA

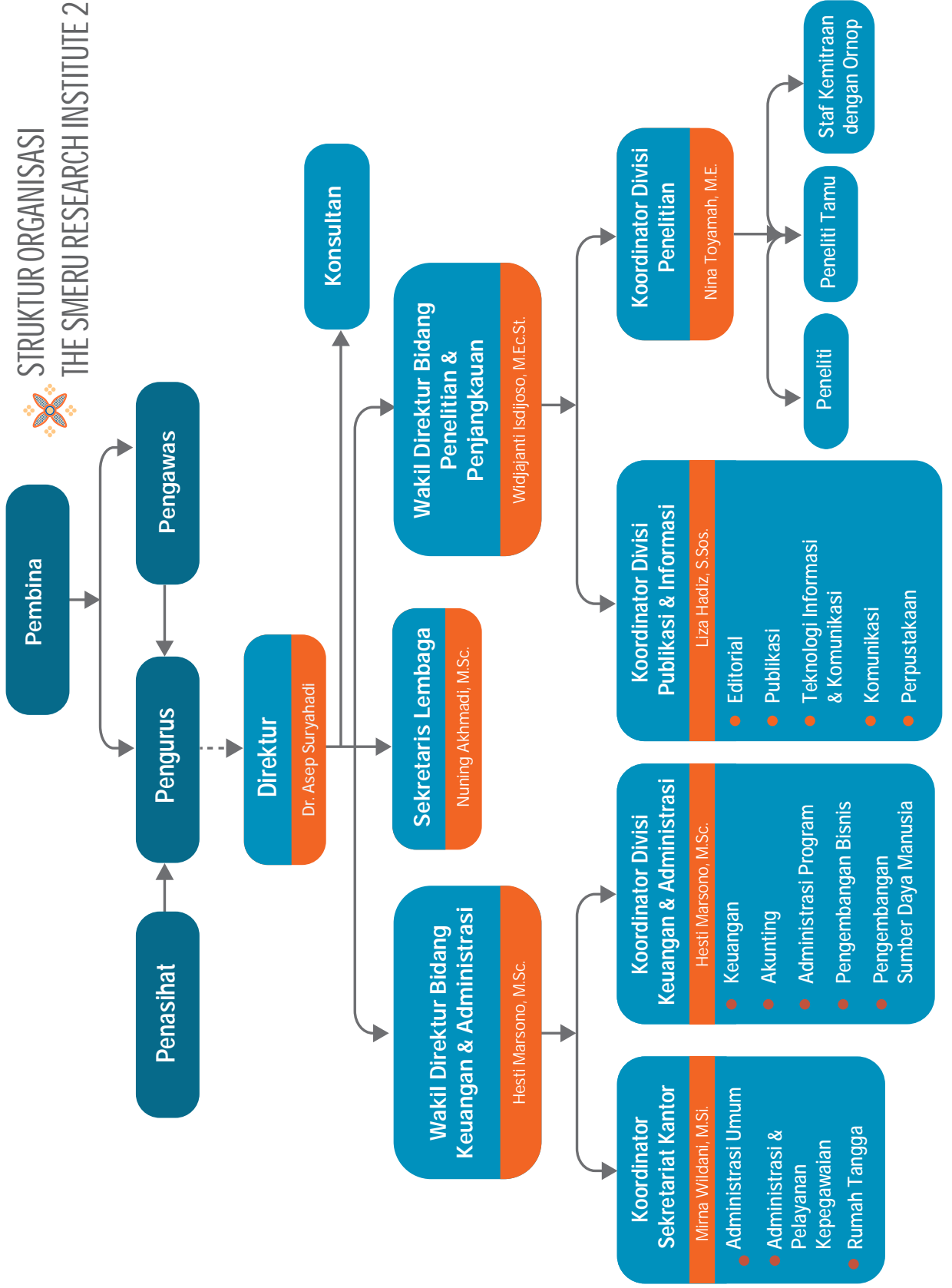
**1.384** KALI | RISET KEBUAKAAN  
PENDIDIKAN  
ANAK DI INDONESIA

**1.289** KALI | ENHANCING ROLE OF FAMILY  
AND SOCIAL WORKER FOR  
CHILDREN WITH DISABILITY

**1.105** KALI | ECONOMIC GROWTH AND  
POVERTY REDUCTION IN  
INDONESIA BEFORE AND  
AFTER THE ASIAN  
FINANCIAL CRISIS



Keluarga besar SMERU dalam acara Annual Strategic Meeting 2016 di Yogyakarta



# YAYASAN SMERU

## PEMBINA

Dr. Syaikhu Usman	Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Gregory Churchill, JD	Wakil Ketua	Konsultan hukum & dosen (purnatugas)
Dr. Joan Hardjono	Anggota	Peneliti independen, Bandung
Dr. Sudarno Sumarto	Anggota	The SMERU Research Institute & TNP2K, Jakarta
Dr. Syarif Hidayat	Anggota	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
Dr. Chris Manning	Anggota	The Australian National University, Canberra, Australia

## PENGURUS

Dr. Asep Suryahadi	Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.	Wakil Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Nuning Akhmadi, M.Sc.	Sekretaris	The SMERU Research Institute, Jakarta
Hesti Marsono, M.Sc.	Bendahara	The SMERU Research Institute, Jakarta

## PENGAWAS

Dr. Ilyas Saad	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta
Bambang Sulaksono, M.M.	The SMERU Research Institute, Jakarta



## PENASIHAT

Prof. Boediono	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Dr. Chris Manning	The Australian National University, Canberra, Australia
Prof. James J. Fox	The Australian National University, Canberra, Australia
Dr. Joan Hardjono	Peneliti independen, Bandung
Prof. Gavin W. Jones	National University of Singapore, Singapura
Prof. Gustav F. Papanek	Boston Institute for Developing Economies, Boston, Amerika Serikat
Prof. Lant H. Pritchett	Harvard University, Cambridge MA, Amerika Serikat
Prof. Mohamad Ikhsan	Universitas Indonesia, Jakarta
Dr. Solita Sarwono	Konsultan lepas, Wassenaar, Belanda



Bambang C. Hadi/SMERU



## THE SMERU RESEARCH INSTITUTE

### MANAJEMEN

DIREKTUR

Dr. Asep Suryahadi

WAKIL DIREKTUR BIDANG PENELITIAN & PENJANGKAUAN

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.

WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN

Hesti Marsono, M.Sc.

SEKRETARIS LEMBAGA

Nuning Akhmadi, M.Sc.

### DIVISI PENELITIAN

KOORDINATOR

- Nina Toyamah, M.E.

PENELITI UTAMA

- Dr. Sudarno Sumarto
- Dr. Syaikhu Usman

PENELITI SENIOR

- Athia Yumna, M.Sc.
- Bambang Sulaksono, M.M.
- Dr. Heni Kurniasih
- Luhur Bima, M.Sc.
- M. Sulton Mawardi, M.Comm.
- Muhammad Syukri, M.Si.
- Palmira Permata Bachtiar, M.Phil.
- Rachma Indah Nurbani, M.A.
- Dr. Stella Aleida Hutagalung

PENELITI

- Akhmadi, S.E.
- Ana Rosidha Tamyis, M.M.
- Asep Kurniawan, S.I.P.
- Asri Yusrina, MEcon
- Dyan Widyaningsih, S.Sos.
- Emmy Hermanus, MPH
- Gema Satria Mayang Sedyadi, M.S.
- Ir. Hastuti
- Joseph Nathanael Marshan, M.Ec.
- Mayang Rizky, M.Sc.
- Meuthia Rosfadhila, M.P.P.

PENELITI

- Michelle Andrina, M.S.E.
- Niken Kusumawardhani, M.Sc.
- Nila Warda, M.Ec.Pol
- Rika Kumala Dewi, MDS
- Rendy Adriyan Diningrat, M.Eng.
- Ruhmaniyati, S.E.
- Ulfah Alifia, M.Si.
- Valentina Y. D. Utari, MDS
- Yudi Fajar M. Wahyu, M.A.

PENELITI JUNIOR

- Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, S.E.
- Budiani, S.Sos.
- Elza Samantha Elmira, MPH (Adv)
- Fatin Nuha Astini, M.AP
- Hafiz Arfyanto, S.E.
- Nurmala Selly Saputri, SKM
- Rezanti Putri Pramana, B.Sc. (Hons) in Psychology
- Ridho Al Izzati, S.E.
- Veto Tyas Indrio, S.E.

PENELITI MITRA

- Dr. Daniel Suryadarma

STAF KEMITRAAN ORNOP

- Ir. Hariyanti Sadaly





## DIVISI PUBLIKASI & INFORMASI

### KOORDINATOR

- Liza Hadiz, S.Sos.

### PENERJEMAH/EDITOR SENIOR

- Budhi Adrianto, S.T.
- Mukti Mulyana, S.I.P.

### PENERJEMAH/EDITOR

- Gunardi Handoko
- Bryanna Wilson, B.A.

### STAF PUBLIKASI & DISTRIBUSI

- Heru Sutapa, S.Kom.

### STAF PUBLIKASI & DESAIN

- Novita Maizir, S.Sos.

### STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI SENIOR

- Bambang C. Hadi, M.Sc.

### STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI JUNIOR

- Toni Parwanto, S.Kom.

### STAF KOMUNIKASI

- Ratri Indah Septiana, M.A.

### PUSTAKAWAN

- Stevanus Yulyanto, S.Hum.



## DIVISI KEUANGAN & ADMINISTRASI

### STAF AKUNTING SENIOR

- Aris Kustanto, S.E.

### STAF KEUANGAN SENIOR

- Rusky Aviandhi, M.M.

### KOORDINATOR SEKRETARIAT KANTOR

- Mirna Wildani, M.Si.

### ASISTEN KANTOR

- Aang Ahbari
- Abdul Rokhim
- Dakim
- Gogo Margo

### SOPIR

- E. Muchtar

### STAF ADMINISTRASI PROGRAM JUNIOR

- Felisita Lethe, S.Ip

### STAF ADMINISTRASI KANTOR

- Mardiani

### ASISTEN ADMINISTRASI KANTOR

- Supriyadi

### SATPAM

- Abdul Hakim
- Adi Panca
- Eka Permana
- Subiyantoro

## YAYASAN SMERU

### Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(Disajikan dalam Rupiah)

	2016 (Belum teraudit)	2015 (Belum teraudit)
<b>ASET</b>		
<b>Aset lancar</b>		
Kas dan setara kas	21.254.969.260	24.658.691.468
Investasi jangka pendek	18.223.808.262	15.665.090.789
Uang muka	185.000.000	430.473.400
Piutang lain-lain	689.027.224	521.966.660
Biaya dibayar di muka	492.267.230	265.838.679
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>40.845.071.976</b>	<b>41.542.060.996</b>
<b>Aset tidak lancar</b>		
Aset tetap - bersih	8.051.623.878	8.156.878.387
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>8.051.623.878</b>	<b>8.156.878.387</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>48.896.695.854</b>	<b>49.698.939.383</b>
<b>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		
<b>Kewajiban</b>		
Utang pajak	92.980.800	71.040.500
Biaya yang masih harus dibayar	188.700.429	152.928.979
Utang lain-lain	17.060.051	9.514.590
Kewajiban imbalan kerja	2.510.420.000	2.118.020.000
<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>2.809.161.280</b>	<b>2.351.504.069</b>
<b>Aset bersih</b>		
Tidak terikat	44.303.312.919	45.683.976.724
Terikat temporer	1.657.451.980	1.536.688.915
Terikat permanen	126.769.675	126.769.675
<b>Jumlah aset bersih</b>	<b>46.087.534.574</b>	<b>47.347.435.314</b>
<b>Jumlah kewajiban dan aset bersih</b>	<b>48.896.695.854</b>	<b>49.698.939.383</b>



## YAYASAN SMERU

### Laporan Aktivitas & Perubahan Aset Bersih per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(Disajikan dalam Rupiah)

	2016 (Belum teraudit)		Jumlah	2015 (Belum teraudit)
	Terikat temporer	Tidak terikat		
<b>Penerimaan</b>				
Penerimaan dari donor	21.681.681.827	-	21.681.681.827	26.056.147.819
Penerimaan dari lain-lain	-	448.319.842	448.319.842	(634.912.666,14)
Laba/rugi yang belum realisasi	-	-	-	-
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>21.681.681.827</b>	<b>448.319.842</b>	<b>22.130.001.669</b>	<b>25.421.235.153</b>
<b>Pengeluaran</b>				
Beban program	10.784.450.010	-	10.784.450.010	17.749.404.238
Beban operasional	-	11.963.005.762	11.963.005.762	7.445.646.232
Beban penyusutan	-	119.864.509	119.864.509	165.711.006
Beban lain-lain	-	522.582.129	522.582.129	371.964.849
<b>Jumlah pengeluaran</b>	<b>10.784.450.010</b>	<b>12.605.452.399</b>	<b>23.389.902.409</b>	<b>25.732.726.324</b>
<b>Perubahan dalam aset bersih</b>	<b>10.897.231.818</b>	<b>(12.157.132.558)</b>	<b>(1.259.900.740)</b>	<b>(311.491.171)</b>

#### YAYASAN SMERU

#### LAPORAN AKTIVITAS & PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2016

(Disajikan dalam Rupiah)

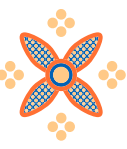
	Terikat temporer	Terikat permanen	Tidak terikat	Jumlah
Aset bersih awal, 01 Januari 2015	31.275.408.701	126.769.675	16.256.748.109	47.658.926.485
Perubahan aset bersih	(29.738.719.786)	-	29.427.228.615	(311.491.171)
Aset bersih akhir, 31 Desember 2015	1.536.688.915	126.769.675	45.683.976.724	47.347.435.314
Perubahan aset bersih	120.763.065	-	(1.380.663.805)	(1.259.900.740)
<b>Aset bersih akhir, 31 Desember 2016</b>	<b>1.657.451.980</b>	<b>126.769.675</b>	<b>44.303.312.919</b>	<b>46.087.534.574</b>

## YAYASAN SMERU

### Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(Disajikan dalam Rupiah)

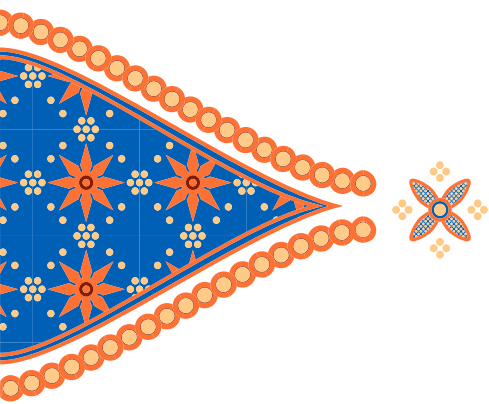
	2016 (Belum teraudit)	2015 (Belum teraudit)
<b>ASET</b>		
<b>Aset lancar</b>		
Kas dan setara kas	21.254.969.260	24.658.691.468
Investasi jangka pendek	18.223.808.262	15.665.090.789
Uang muka	185.000.000	430.473.400
Piutang lain-lain	689.027.224	521.966.660
Biaya dibayar di muka	492.267.230	265.838.679
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>40.845.071.976</b>	<b>41.542.060.996</b>
<b>Aset tidak lancar</b>		
Aset tetap - bersih	8.051.623.878	8.156.878.387
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>8.051.623.878</b>	<b>8.156.878.387</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>48.896.695.854</b>	<b>49.698.939.383</b>
<b>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		
<b>Kewajiban</b>		
Utang pajak	92.980.800	71.040.500
Biaya yang masih harus dibayar	188.700.429	152.928.979
Utang lain-lain	17.060.051	9.514.590
Kewajiban imbalan kerja	2.510.420.000	2.118.020.000
<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>2.809.161.280</b>	<b>2.351.504.069</b>
<b>Aset bersih</b>		
Tidak terikat	44.303.312.919	45.683.976.724
Terikat temporer	1.657.451.980	1.536.688.915
Terikat permanen	126.769.675	126.769.675
<b>Jumlah aset bersih</b>	<b>46.087.534.574</b>	<b>47.347.435.314</b>
<b>Jumlah kewajiban dan aset bersih</b>	<b>48.896.695.854</b>	<b>49.698.939.383</b>



Kantor SMERU di kawasan Cikini, Jakarta

Mukiti Mulyana/SMERU





#### DEWAN REDAKSI

Asep Suryahadi  
Widjajanti Isdijoso  
Hesti Marsono  
Nuning Akhmadi  
Syaikhu Usman  
Nina Toyamah

#### REDAKSI

**Pengumpul Data**  
Ratri Indah Septiana  
Felisita Lethe

#### Editor

Budhi Adrianto  
Gunardi Handoko  
Liza Hadiz

#### Desainer Grafis

Novita Maizir

#### Desainer Infografis

Stevanus Yulyanto  
Nurmala Selly Saputri  
Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma  
Ruhmaniyati  
Novita Maizir


#### Staf Distribusi

Heru Sutapa

Foto Sampul: Palmira Permata Bachtiar

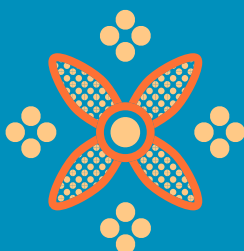


 Jl. Cikini Raya No. 10A  
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;  
+6221 3193 0850 (fax)

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id



 The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute

